

Mei 2019

Volume 2, Nomor 5

Bulletin Attani Tokyo



**ATASE PERTANIAN
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA**



Daftar Isi:

G20 2 nd Agriculture Deputy Meeting	1
G20 Agriculture Ministers' Meeting	2
Breakout Session	3
Usahatani Padi Niigata	4
Bilateral Meetings	5
Kunjungan Kerja Menteri Pertanian	6
Request TFY Japan	7
Kamis Power	8
FGD Tim ISPO	9
Eco Support	10
Courtesy Call to Ambassador	11
Hearing Session	12
Hitachi Ltd	13
Pemkot Yokote	14
Awina Sinergi	15

5-2-9 Higashi Gotanda

Phone: (81) 3-3447 - 6364
Fax: (81) 3-3447 - 6365
E-mail: agriculture@kbritokyo.jp

G20 2nd Agriculture Deputy Meeting

The 2nd G20 Agriculture Deputies Meeting (ADM) dengan Presidensi Jepang diselenggarakan di Niigata pada tanggal 10 Mei 2019. Pertemuan dihadiri oleh seluruh perwakilan negara-negara anggota G20, negara tamu dari Senegal, Spanyol, Singapura, Thailand, Chili, dan Belanda, serta perwakilan organisasi internasional di bidang pertanian, seperti Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Food Policy Research Institute (IFPRI), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), World Bank, World Food Program (WFP), dan World Trade Organization (WTO).

Pertemuan the 2nd ADM bertujuan memfinalisasi draft declaration of the Agriculture Ministers' Meeting dengan mengangkat 3 pilar isu pertanian, yaitu Innovation toward future sustainability of the agro-food sector, Food value chains toward inclusive growth of the agro-food sector, dan Knowledge exchange to address global issues. Delegasi Republik Indonesia (DELRI) yang diketuai Acting Director Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Erizal Jamal menyampaikan beberapa masukan tentang pentingnya akses pengetahuan dan keterampilan bagi petani skala kecil dalam pemanfaatan inovasi dan teknologi.

"Indonesia mendorong agar deklarasi menyeimbangkan antara isu-isu inovasi dan agro-food di negara maju dengan dukungan terhadap para petani kecil serta mendorong para petani muda untuk dapat mengakses pengetahuan dan keterampilan. Indonesia sependapat dengan highlight dari UN Resolution Decade tentang Family Farming untuk digunakan sebagai referensi dalam pemberdayaan petani dan peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui penerapan inovasi dan teknologi" papar Erizal.

Forum dapat menerima usulan Indonesia tersebut, sehingga dapat dilanjutkan dengan pembahasan tentang pentingnya transparansi dalam pasar pangan untuk membantu petani memitigasi volatilitas harga serta perlunya dukungan finansial sukarela secara reguler dari negara G20 untuk Agricultural Market Information System (AMIS). Selain pembahasan ketiga pilar isu pertanian, dilakukan juga knowledge sharing tentang penanganan isu global menuju capaian 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Niigata, 10 Mei 2019.



G20 Agriculture Ministers' Meeting

Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman hadir sebagai Ketua DELRI pada pertemuan Tingkat Menteri Group 20 (G20) Presidensi Jepang yang diselenggarakan di Prefektur Niigata, Jepang untuk menghasilkan Deklarasi Menteri Pertanian Negara-negara G20. Dalam Plenary Session G20 Agriculture Ministers' Meeting (G20 AMM), bersama 16 menteri pertanian anggota G20, 4 menteri pertanian negara tamu undangan, dan 8 pimpinan organisasi internasional di bidang pertanian seperti ERIA, FAO, IFAD, IFPRI, OECD, World Bank, WFP, dan WTO, Amran menjadi satu-satunya Menteri Pertanian negara ASEAN yang hadir sebagai anggota G20. Karena naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju, kehadiran Amran dalam ajang pertemuan bergengsi Menteri Pertanian negara-negara maju ini sangat dinantikan banyak pihak.

Dalam Plenary Session Menteri Pertanian RI menyampaikan usulan yang mengusung kepentingan Indonesia, antara lain pentingnya kesetaraan akses bagi petani kecil dalam memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk mendorong kemajuan petani melalui penguatan digitalisasi, sehingga akan membuka peluang baru pengembangan dan akses terhadap rantai nilai pangan pertanian sebagai modal dasar pembangunan sumberdaya manusia. Teknologi digital demikian penting untuk negara kepulauan seperti Indonesia dalam menghubungkan produsen dan konsumen dari berbagai daerah dan pulau yang tersebar menggunakan teknologi berbasis internet di era industri 4.0.

"Sumberdaya manusia pertanian merupakan modal pembangunan yang penting. Kewirausahaan petani muda di pedesaan harus didorong karena minat generasi muda terhadap sektor pertanian saat ini menurun. Indonesia berpendapat bahwa pengetahuan dan keterampilan generasi muda pertanian dan petani skala kecil perlu ditingkatkan. Generasi milenial demikian tertarik dengan internet dan teknologi informasi. Maka, digitalisasi sangat tepat untuk menarik generasi muda masuk ke sektor pertanian" urai Amran.

Dalam breakout session pun Menteri Pertanian menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai 17 tujuan SDGs bersamaan dengan tantangan kelaparan dan perubahan iklim yang dihadapi negara-negara di dunia.

"Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional yang berisi program-program lima tahun ke depan terkait aktivitas pendukung pencapaian tujuan SDGs di tahun 2030 yang kami tuangkan di dalam Road Map" jelas Amran.

"Indonesia membuat program khusus yang modern, holistik, dan inovatif dengan beberapa terobosan revolusioner. Oleh karena itu, pendapatan nasional Indonesia naik 34,3%, investasi asing dalam bentuk Foreign Direct Investment meningkat dramatis hingga 110%, dan ekspor pertanian pun naik 29,7%, sehingga inflasi pangan turun menjadi 8%. Di level rumah tangga, angka kematian bayi turun 1,9% dan jumlah balita dengan gisi buruk pun turun 3%. Dampak makro luar biasa yang kami alami adalah tingkat kemiskinan menembus satu digit, 9,66%" tegas Amran mengungkapkan capaian pembangunan pertanian yang membanggakan.

Penurunan kasus gizi buruk merupakan dampak positif dari program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebagai upaya mendukung penyediaan bahan pangan pertanian secara mandiri dengan memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar rumah tinggal. Nutrisi vitamin dan mineral yang diperlukan balita pada masa pertumbuhan dapat dipenuhi keluarga dengan mengkonsumsi sayur dan buah hasil panen di pekarangan sendiri. Program KRPL sejalan dengan UN Resolution Decade on Family Farming yang bertujuan untuk memperbaiki tingkat ketahanan pangan. Karena paparan tersebut, State Secretary of Agro Industry Argentina, Luis Miguel Etchevehere menyatakan kekagumannya kepada Kementerian Pertanian dan Indonesia secara langsung kepada Menteri Pertanian RI di tengah berlangsungnya exhibition tour yang dihadiri seluruh ketua delegasi. Beberapa negara anggota G20 dan organisasi internasional pun menyatakannya keinginannya untuk berdialog langsung dengan Menteri Pertanian RI selama G20 AMM Niigata berlangsung. Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Takamori Yoshikawa, Menteri Pertanian, Peternakan dan Pasokan Pangan Brazil, Tereza Cristina Correa Dias Da Costa, Menteri Lingkungan dan Sumberdaya Air Singapura, Masagos Zulkifli, Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan China, Changfu Han, Ketua Delegasi India, Ramesh Chand, dan President ERIA, Hidetoshi Nishimura menemui dan berkenalan secara khusus dengan Menteri Pertanian RI untuk mengagendakan pertemuan bilateral formal lebih lanjut di Jakarta.

Niigata, 11 Mei 2019.



Depan KI-KA: Sergey LEVIN (Rusia), Malcolm THOMPSON (Australia), Ramesh CHAND (India), Tereza Cristina CORREA DIAS DA COSTA (Brazil), Didier GUILLAUME (Perancis), Julia KLÖCKNER (Jerman), Andi Amran SULAIMAN (Indonesia), Changfu HAN (China), Luis Miguel ETCHVEHERE (Argentina), Takamori YOSHIKAWA (Jepang), Abdulrahman AL FADLEY (Saudi Arabia), Phil HOGAN (UE), Sonny PERDUE (AS), Gian Marco CENTINAIO (Italia), Gae-ho LEE (Korea), Victor M. VILLALOBOS (Meksiko), Marie-Claude BIBEAU (Kanada), Robert GOODWIL (Inggris), Phindiwe DINGILE (Afrika Selatan)

Belakang KI-KA: Ute Maria KLAMERT (WFP), Ken ASH (OECD), Charlotte Sofia Elizabeth SALFORD (IFAD), Jaime Jose Rivera GUZMAN (Chili), Grisada BOONRACH (Thailand), MASAGOS Zulkifli (Singapura), Carola Johanna SCHOUTEN (Belanda), Moussa BALDE (Senegal), Fernando MIRANDA SOTILLOS (Spanyol), Jose Francisco GRAZIANO DA SILVA (FAO), Shenggen FAN (IFPRI), Juergen Michael VOEGELE (World Bank), Alan WOLFF (WTO)

Breakout Session

Tiga pilar isu pertanian yang menjadi tema pertemuan G20 Agriculture Ministers' Meeting dibahas secara khusus dalam working group untuk memperkaya isu yang diangkat di dalam Deklarasi G20 AMM. Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Takamori Yoshikawa, State Secretary Agro-Industri Argentina, Luis Miguel Etchevehere, dan Menteri Lingkungan, Air, dan Pertanian Arab Saudi, Abdulrahman Al Fadley, secara bergantian memimpin diskusi sesuai pilar isu pertanian yang dibahas di dalam breakout session.

Delegasi Indonesia yang tergabung di dalam breakout session #3 menyampaikan kebijakan dan perkembangan terkait upaya Indonesia mencapai SDGs dengan meluncurkan program khusus untuk memodernisasi sektor pertanian, memanfaatkan inovasi dan pembangunan fisik infrastruktur pertanian, serta pemberdayaan petani dan pembangunan desa. Indonesia juga memaparkan pentingnya public private partnership dalam mengembangkan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pangan yang berkelanjutan, termasuk pembiayaan lembaga penelitian dan penyuluh oleh swasta dan pemerintah.

JAPAN



Takamori YOSHIKAWA
Minister of Agriculture,
Forestry and Fisheries

“Perkembangan agro-industri di beberapa negara cukup beragam, untuk itu dipandang penting keterhubungan satu negara dengan negara yang lain dalam suatu kerjasama untuk mengembangkan produktivitas pertanian. Dari sisi sumberdaya, diperlukan keterlibatan aktif generasi muda dan perempuan di dalam sektor pertanian, sehingga terjalin kerjasama dengan sektor di luar pertanian untuk pengembangan food value chain“

Breakout session #1: Fostering innovative human resources and new technologies

“Akses teknologi informasi bagi petani sangat penting dalam rangka meningkatkan transparansi biaya produksi, logistik, informasi harga internasional dan juga permintaan pasar. Petani juga perlu diberi akses finansial dan perlindungan melalui asuransi pertanian, sehingga tercapai efisiensi pemanfaatan sumber daya pertanian. Dengan transparansi, maka kebijakan yang menghambat perdagangan dan investasi di sektor pertanian akan menurun, sehingga tercipta kompetisi pasar yang sehat. Tidak terjadi kesenjangan antara supermarket dengan koperasi pertanian“

ARGENTINA



Luis Miguel
ETCHEVEHERE
State Secretary of
Agro-industry

Breakout session #2: Focusing on Food Value Chain, Facilitating Farmers and other FVCs stakeholders' benefit

SAUDI ARABIA



Abdulrahman AL FADLEY
Minister of Environment,
Water and Agriculture

“G20 perlu memiliki framework dan roadmap untuk mengatasi permasalahan food loss dan food waste. Menurut perkiraan FAO, sepertiga produksi pangan untuk konsumsi global telah terbuang. Oleh karena itu, dalam menyusun roadmap ini harus ada penyesuaian kondisi satu negara dengan negara yang lain. Sebagai forum negara maju, dianggap penting untuk memanfaatkan teknologi, digitalisasi, dan artificial intelligence guna memitigasi risiko melalui informasi dan analisa berbagai dimensi sebagai dasar perumusan kebijakan yang efektif“

Breakout session #3: Pursuing possible contribution to achieve Sustainable Development Goals (SDGs)

Usahatani Padi Niigata

Di sela-sela agenda G20 Agriculture Ministers' Meeting, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman mengunjungi lahan persawahan di 1475 Hirabayashi, Kita-ku, Niigata-shi, Niigata-ken untuk mendapatkan finding fact budidaya padi di Jepang. Menteri Pertanian menyaksikan derasnya aliran air irigasi pada saluran tersier yang terlihat asri. Menteri Pertanian berdialog dengan petani padi Masato Suto yang juga chairman The Niigata Agricultural Exchange Council (NAEC). Didampingi petani muda yang magang pada Suto, Ahmad Sri Maulana, pemuda tani asal desa Kalibuntu, Pabedilan, Cirebon, perwakilan dari Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Terpadu IKAMAJA Garut, Suto berdialog dengan Menteri Pertanian tentang seluk beluk budidaya padi di Prefektur Niigata, sentra produksi padi di Jepang.

Dari dialog dengan petani terungkap bahwa petani Jepang cukup mendapatkan fasilitas yang sangat memadai dalam melakukan usahatani. Fasilitas pemerintah yang paling menonjol adalah tersedianya sarana input produksi yang lengkap dan diserapnya hasil produksi oleh Japan Agriculture (JA), Koperasi Pertanian Jepang. Japan Agriculture memberi bantuan pembiayaan tanpa bunga untuk pembelian pupuk dan pestisida setara Rp13 juta/ha yang digunakan untuk pembelian pupuk Rp8 juta dan untuk pembelian pestisida Rp5 juta. Untuk benih padi Japonica, petani menyediakan secara mandiri.

"Kami sudah full mekanisasi Daijin (Menteri). Mulai tanam sampai panen karena kami mengalami kesulitan tenaga kerja. Maka dari itu kami mendatangkan magang petani muda asal Indonesia. Maulana tinggal bersama kami. Sudah saya anggap keluarga. Dia semangat bekerja dan kemampuan bahasa Jepangnya lebih bagus daripada Senpainya" jelas Suto.

"Pemerintah memberi dukungan fasilitasi pembiayaan dan mekanisasi pertanian. Usahatani padi sangat memberi insentif finansial yang menguntungkan bagi kami para petani untuk memproduksi dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan" imbuh Suto.

"Satu hektar berapa biayanya dan juga berapa ton hasilnya? Lalu gabahnya dijual ke mana dan berapa harganya?" tanya Amran penasaran.

"Produktivitas padi di sini rata-rata 4,3 ton gabah kering giling (GKG)/ha dengan harga rata-rata setara Rp30 ribu/kg. Hasil panen semua dibeli oleh JA. Kami hanya menyisakan sedikit untuk kami simpan dan konsumsi sehari-hari" jawab Suto.

Pendapatan petani padi di Jepang per musim tanam rata-rata setara Rp130 juta. Pertanaman padi di Jepang hanya satu kali, yaitu selama April - September, selebihnya digunakan untuk usahatani hortikultura. Bercermin pada petani Jepang, petani padi Indonesia semestinya bisa sejahtera petani Jepang mengingat produktivitas padi Indonesia jauh lebih tinggi dibanding padi di Jepang. Produktivitas padi Indonesia 5,2 ton GKG/ha, sedangkan Jepang hanya 4,3 ton GKG/ha. Tingginya harga gabah yang diterima petani melalui JA merupakan faktor utama penentu tingginya pendapatan petani padi Jepang. Dengan harga GKG Rp4,6 ribu/kg dan produktivitas 5,2 ton/ha, maka pendapatan petani padi Indonesia rata-rata hanya sekitar Rp24 juta/musim tanam. Dengan temuan lapang ini, Menteri Pertanian menggarisbawahi bahwa kesejahteraan petani padi di Indonesia masih dapat ditingkatkan dengan kebijakan harga yang lebih baik.

Niigata, 11 Mei 2019.



Bilateral Meetings

Selama berlangsungnya G20 Agriculture Ministers' Meeting, Menteri Pertanian RI melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa menteri negara mitra dagang strategis guna mendorong fasilitasi akses pasar yang lebih besar bagi komoditas ekspor unggulan pertanian Indonesia, terutama buah-buahan tropis, produk perkebunan, dan sarang burung walet. Buah-buahan tropis yang dipromosikan Menteri Pertanian kepada negara mitra dagang antara lain salak, nanas, manggis, pisang, dan mangga. Sementara itu, untuk produk perkebunan yang dipromosikan adalah kelapa sawit, kelapa, kopi, lada, pala, dan kakao. Niigata, 11-12 Mei 2019.



Menteri Pertanian RI & Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Takamori Yoshikawa



Menteri Pertanian RI & Komisi Pertanian dan Pembangunan Pedesaan UE, Phil Hogan



Menteri Pertanian RI & State Secretary of Agro Industry Argentina, Luis Miguel Etchevehere



Menteri Pertanian RI & Ketua Delegasi India, Ramesh Chand



Menteri Pertanian RI & Wakil Menteri Pertanian Federasi Rusia, Sergey Levin



Menteri Pertanian RI & Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan China, Changfu Han



Menteri Pertanian RI & Direktur Jenderal FAO, Jose Francisco Graziano Da Silva

Kunjungan Kerja Menteri Pertanian



Menteri Pertanian memimpin DELRI tiba di Tokyo, disambut Duta Besar dan Atase Pertanian.

Jum'at, 10 Mei 2019

Menteri Pertanian berangkat menuju Niigata dipandu Sekretariat G20 AMM

Sabtu, 11 Mei 2019



Menteri Pertanian tiba di Niigata disambut Liaison Officer to Minister untuk menghadiri rangkaian agenda G20 AMM.

Sabtu-Minggu, 11-12 Mei 2019

Menteri Pertanian tiba kembali di Tokyo. Deputy Chief of Mission dan Atase Pertanian mendampingi Menteri Pertanian dalam jamuan makan malam hingga waktu keberangkatan ke tanah air.

Minggu, 12 Mei 2019



Request TFY Japan

Syozo Fujita dan Youhei Tsukada hadir sebagai utusan TFY Ltd, sebuah perusahaan produsen daun bawang (bouncing onion) terbesar di Jepang. TFY menyampaikan kepada Atase Pertanian minatnya untuk mendatangkan petani daun bawang Indonesia sebagai pemegang dan melanjutkan sebagai pekerja di pertanian yang sama milik TFY Ltd.

“Kami ingin bekerja sama dengan Indonesia mendatangkan empat orang petani daun bawang yang berusia 20-25 tahun sebagai pemegang di Prefektur Ibaraki. Mohon infonya jika hal itu dimungkinkan” pinta Tsukada.

“Penyelenggaraan magang di Kementerian Pertanian di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Kami akan bersurat menyampaikan permintaan TFY ini. Yang dimaksud petani daun bawang di sini apakah memang harus petani yang sudah bercocok tanam daun bawang di Indonesia atau petani muda pembudidaya tanaman apa saja bisa diikutsertakan?” jawab Nuryanti seraya bertanya lebih lanjut.

“Kami dan penyelenggara magang di Jepang mempunyai pertimbangan khusus untuk mendatangkan petani muda yang telah terbiasa membudidayakan daun bawang. Agar nantinya kalau kembali ke Indonesia, mereka dapat menggunakan ilmunya dari Jepang. Jadi setelah kembali itu, kami yakin pengalamannya bisa dilanjutkan di Indonesia” jelas Fujita.



“Baik jika demikian, kami bisa memahami. Saat ini Pemerintah Jepang sudah membuka peluang bagi pemegang untuk langsung melanjutkan sebagai pekerja. Apakah TFY bisa menyelenggarakan skema itu?” tanya Nuryanti.

“Tentu saja bisa. TFY perusahaan besar. Pada tiga tahun pertama petani muda akan magang dengan visa Ginoujissyusei. Nanti di akhir masa magang mereka bisa mengikuti serangkaian ujian kelayakan untuk langsung lanjut sebagai pekerja selama lima tahun dengan visa Tokuteiginou” terang Tsukada.

“Apakah ada syarat-syarat lain untuk pemegang yang diminta TFY selain harus petani daun bawang?” tanya Nuryanti lebih lanjut.

“Pertama, kami hanya akan menerima pemegang laki-laki. Kedua, mereka harus belajar Bahasa Jepang minimal program 180 jam. Kami berharap Memorandum of Understanding (MOU) dengan Indonesia bisa ditandatangani tahun 2019 ini. Dengan begitu mereka sudah siap berangkat pada tahun 2020 nanti” imbuh Fujita di akhir pertemuan.

Tokyo, 14 Mei 2019.

Kamisu Power

Atase Pertanian bersama Sekretaris III Ekonomi mendampingi Deputy Chief of Mission, Tri Purnajaya menghadiri undangan jamuan makan malam oleh Kamisu Power Plant LLC, sebuah perusahaan energi terbarukan di Jepang yang mengimpor bahan baku berupa RBD palm stearin dan RBD palm oil dari Indonesia. CEO Kamisu Power, Jun Hamamura didampingi Sales Manager, Ken-ichiro Yanagida, menyampaikan profil perusahaan dan bisnis energi terbarukan yang dirintis di Jepang bersama perusahaan energi asal Indonesia, Gama Energy, yang diwakili oleh CEO, Chong Chee Loong.

“Kami telah mempunyai satu unit pembangkit tenaga diesel dengan kapasitas 38 MW di satu unit pabrik yang berlokasi di Okunoya, Kamisu. Kami juga telah membangun dua unit power plant masing-masing dengan kapasitas 25 MW dan 13 MW. Dalam waktu dekat, pembangunan dan instalasi power plant baru dengan kapasitas 2 MW dan 1 MW akan segera kami rampungkan” jelas Jun antusias.

“Kami sangat mendukung Pemerintah Republik Indonesia untuk meminta Pemerintah Jepang menerima Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai sertifikasi untuk kelapa sawit dan produk turunannya melalui Ministry of Energy, Trade, and Economy (METI). Kami akan bekerja sama dengan KBRI dalam menggali data dan informasi terkait kebijakan energi dan perdagangan biomassa dan bahan bakar di Jepang” imbuh Ken.

“Terima kasih atas dukungan dan antusiasme untuk bekerja sama dengan Indonesia mempromosikan kelapa sawit dengan sertifikasi ISPO di pasar Jepang. Atase Pertanian akan berkomunikasi dengan Kamisu untuk koordinasi lebih lanjut” sambut Tri.

“Kami yakin bahwa Indonesia dapat mengkonfirmasi aspek keberlanjutan yang diminta pihak METI kepada kami untuk sistem sertifikasi ISPO. Data dan informasi dari Kamisu sangat kami perlukan sebagai bahan masukan” tambah Nuryanti.

“Hubungan B2B seperti Gama Energy dengan Kamisu Power ini harus diduplikasi lebih banyak, sehingga tercipta demand-driven supply chain. Dengan begitu, peluang pasar biomassa dan bahan bakar dengan bahan baku kelapa sawit yang tersertifikasi ISPO akan meningkat. Hal ini juga akan mendukung tingkat keberterimaan sistem sertifikasi ISPO oleh Pemerintah Jepang. Untuk itu mari kita bekerja sama. Kami meningkatkan kapasitas produksi dan volume ekspor, Kamisu meningkatkan jumlah dan kapasitas power plant di Jepang” pungkas Tri pada jamuan tersebut.

Tokyo, 14 Mei 2019.



FGD Tim ISPO

Atase Pertanian dan Atase Perdagangan memenuhi undangan Ninuk Rahayuningrum, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan pada Focus Group Discussion (FGD) untuk menyiapkan bahan konfirmasi ISPO di depan dewan panelis yang diselenggarakan METI pada tanggal 27 Mei 2019. Hadir pada FGD tersebut Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura, Kemenko Bidang Ekonomi, Wilistra Danny, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dedi Joenaedi, dan Kepala Sekretariat Komisi ISPO, Azis Hidayat.



“Menyikapi pertemuan dengan METI Jepang pada tanggal 27 Mei 2019 nanti, tujuan utama pertemuan kita hari ini untuk berkoordinasi menyiapkan bahan guna mengkonfirmasi pointer yang telah disiapkan Atase Perdagangan dan Atase Pertanian KBRI Tokyo” sambut Ninuk membuka diskusi.

“METI mengundang Pemerintah Indonesia untuk menjelaskan sistem sertifikasi ISPO untuk kelapa sawit agar dapat diterima oleh Pemerintah Jepang dalam hal ini METI sebagai sistem yang credible sesuai dengan kaidah-kaidah keberlanjutan dan telah dipilih dalam empat aspek untuk dikonfirmasi” tambah Danny.

“Ini kesempatan yang kita tunggu sejak lama. Kami dari KBRI dalam kurun waktu hampir setahun ini bernegosiasi dengan METI untuk menerima tim ISPO melakukan hearing session. Setelah delapan bulan ini selalu ditolak, pada pertemuan dengan kami tanggal 8 Mei 2019 lalu, pihak METI menyampaikan bahwa akan mengadakan hearing session, dan ISPO diberi kesempatan untuk menyampaikan paparan mengkonfirmasi aspek keberlanjutan yang dipersyaratkan Pemerintah Jepang” terang Faried menjelaskan kronologi agenda hearing session yang akan dihadiri tim ISPO.

“Yang harus kita perhatikan adalah waktunya demikian terbatas, hanya dua puluh menit. Oleh karena itu, bahan yang kita susun harus berupa data dan informasi yang terukur sebagai evidence aspek yang harus dikonfirmasi dari sistem sertifikasi ISPO. Hal yang bersifat normatif tidak perlu kita cantumkan di dalam paparan” imbuh Nuryanti.



“Substansi yang akan disampaikan pada prinsipnya untuk menunjukkan kepada METI bahwa Indonesia mempunyai peraturan baku yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 tentang sistem perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Harapannya paparan kita nanti dapat menjadi baseline pemahaman Pemerintah Jepang terhadap ISPO” tambah Dedi.

“Kami dari Komisi ISPO siap mendukung dan menyiapkan bahan yang diperlukan untuk mengkonfirmasi aspek keberlanjutan dari sisi lingkungan, sosial dan ketenagakerjaan, konflik pangan dan bahan bakar, serta hukum dan peraturan dari ISPO” jawab Azis.

Selain menghasilkan bahan paparan konfirmasi ISPO, pertemuan juga menyepakati Delegasi Republik Indonesia yang akan hadir pada acara hearing session dengan dewan panelis dan METI tanggal 27 Mei 2019 adalah Kepala Sekretariat Komisi ISPO dengan didampingi Atase Perdagangan dan Atase Pertanian KBRI Tokyo serta dibantu seorang juru alih bahasa dari kalangan akademisi.

Bogor, 17 Mei 2019.

Eco Support

President Eco Support Co Ltd, Taizo Yamamoto didampingi Engineering Advisor, Sekio Shiraishi bertemu Atase Pertanian untuk melaporkan perkembangan rencana kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V. Eco Support secara aktif menjalin komunikasi dan melakukan kunjungan ke Indonesia pada tanggal 18-23 April 2019 yang lalu dalam rangka persiapan penandatanganan MOU pada bulan Juni 2019.

“Pertama kami sampaikan bahwa tim Eco Support telah melakukan business trip ke Indonesia dan bertemu dengan pihak BPPT, Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Kami juga mengunjungi PTPN V di Pekanbaru dan berkesempatan untuk menjelaskan kepada pihak PTPN V tentang sistem Sustainable Gas Turbine Combined Cycle (S-GTCC). Dari penjelasan kami, PTPN V menetapkan tiga unit mill calon lokasi pilot project sistem S-GTCC. Kami juga mengunjungi dua mill yang lain, Tandum dan Trentam. Berdasarkan kunjungan lapang tersebut kami simpulkan bahwa mill Tandum paling tepat untuk diaplikasikan sistem S-GTCC. Kami bertiga, BPPT, PTPN V dan Eco Support akan mempelajari spesifikasi yang diperlukan untuk mill Tandum” urai Shiraishi.



“Terima kasih atas detail laporan perkembangan kerjasamanya. Terkait hal itu, BPPT memberi informasi akan ada kunjungan tim gabungan dari BPPT, PTPN V, dan GAPKI ke Jepang untuk melakukan survei dan menghadiri G20 Summit 2019 di Osaka. Apakah agendanya sudah dipersiapkan dengan Eco Support?” tanya Nuryanti.

“Benar, akan ada kunjungan tim dari Indonesia ke Jepang. Rencananya pada pertengahan bulan Juni 2019. Tujuannya untuk bertemu dengan METI melakukan audensi. Lalu kami dari Eco Support dan tim Indonesia akan menyelenggarakan seminar energi terbarukan dan meminta pihak KBRI menjadi tuan rumah. Pembicaranya dari Jepang dan Indonesia. Kami berharap Bapak Duta Besar dan pejabat terkait di METI berkenan hadir memberi sambutan pada seminar yang kami selenggarakan. Apakah Atase Pertanian bisa membantu untuk maksud kami tersebut?” tanya Yamamoto.

“Silakan disampaikan proposal kegiatan dan agenda seminar yang direncanakan. Saya akan sampaikan kepada Bapak Duta Besar untuk memperoleh arahan lebih lanjut, termasuk untuk mengundang pejabat dari METI pada seminar tersebut” jawab Nuryanti.

“Baik jika demikian. Pada rapat pemegang saham Eco Support tanggal 29 Mei 2019 nanti, kami akan paparkan kebijakan dan konsensus untuk kegiatan satu tahun ke depan. Termasuk rencana kunjungan tim gabungan dari Indonesia dan rangkaian acara selama tim berada di Jepang untuk melihat power plant yang telah menerapkan sistem S-GTCC guna diduplikasi di Indonesia” tegas Yamamoto.

“Saya tambahkan bahwa dalam kerjasama kami ini ada penggunaan paten baru, yaitu Total System S-GTCC. Aplikasinya juga sudah memasuki tahap akhir. Mitra kami, BPPT demikian proaktif memberi dukungan administrasi dan teknis untuk kelancaran kerjasama ini” ungkap Shiraishi.

“Senang mendengar tahapan kerjasama telah banyak kemajuan yang berarti. Keberadaan kerjasama ini berkontribusi pada keberterimaan Pemerintah Jepang terhadap kelapa sawit asal Indonesia sebagai bahan bakar bebas CO₂. BPPT sebagai lembaga Pemerintah Indonesia tentu antusias dan mendukung penuh karena pengembangan dan penggunaan energi terbarukan menjadi bagian kebijakan energi di Indonesia” pungkas Nuryanti.

Kerjasama three party agreement untuk mengkonversi limbah kelapa sawit menjadi bahan bakar tersebut diharapkan tidak saja menciptakan nilai tambah, namun juga mendorong pertumbuhan ekspor dan pembangunan ekonomi pertanian di Indonesia.

Tokyo, 20 Mei 2019.

Courtesy Call to Ambassador

Kepala Sekretariat Komisi ISPO, Azis Hidayat didampingi Atase Pertanian melakukan courtesy call guna menyampaikan bahan paparan pada hearing session untuk mengkonfirmasi sertifikasi ISPO, sejarah dan perkembangan ISPO, serta meminta arahan lebih lanjut dari Duta Besar, Arifin Tasrif.

“Kesempatan ini sangat langka dan kita tunggu-tunggu. Atase Pertanian sudah berulang kali melaporkan permohonan untuk menghadirkan Tim ISPO ke Jepang untuk bertemu pihak METI, namun selalu ditolak. Karena itu, pada hearing session nanti tolong disampaikan dengan baik dan meyakinkan tentang sertifikasi ISPO kita” jelas Arifin membuka diskusi.

“Baik, Bapak Duta Besar. Kami telah mempersiapkan bahan disertai data dukung dan dokumen legislasi terkait sistem sertifikasi ISPO. Kami ucapkan penghargaan dan terima kasih atas dukungan KBRI membuka peluang ekspor kelapa sawit dengan sertifikasi ISPO ke Jepang” jawab Azis.

“Setelah hearing session ini jangan sampai putus komunikasi dengan METI atau kementerian/lembaga lain di Jepang. Pihak swasta yang telah mengimpor kelapa sawit kita juga harus dirangkul untuk mendukung Indonesia, sehingga peluang ekspor kita akan lebih besar. Kita dorong dan fasilitasi pengusaha Jepang yang mengimpor kelapa sawit Indonesia seperti Kamisu Power untuk bisa mengekspansi usahanya, tidak terbatas pada penggunaan RBD palm stearin dan RBD palm oil saja, namun juga menggunakan cangkang kelapa sawit. Ini ada tim dari Hitachi Ltd yang akan melakukan pengujian teknologi dekomposisi biomassa berkayu seperti bagase tebu dan tandan kosong (tankos) kelapa sawit. Silakan dijalin komunikasi lebih lanjut” tegas Arifin.



“Kalau Pemerintah Jepang akhirnya menerima kelapa sawit kita dengan sistem sertifikasi ISPO, maka kita abaikan saja tindakan kampanye Uni Eropah yang terstruktur, sistematis, dan masif menyerang kelapa sawit Indonesia” tambah Arifin.

“Benar, Bapak Duta Besar. Pasar Jepang demikian potensial mengingat kebijakan energi terbarukan yang diterapkan. Teknologi pembangkit energi ramah lingkungan yang berkembang di Jepang pun sangat menolong Indonesia dalam mengatasi limbah industri pengolahan kelapa sawit. Rupanya tankos pun mulai dilirik Jepang” sambut Azis bersemangat.

“Terima kasih, Bapak Duta Besar atas kesempatannya. Kami dari dua departemen, Thermal Power Business dan e-Value Trading Business Creation, mohon info ketersediaan waktu untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Atase Pertanian” pinta Yasuo Tanabe, Special Representative for External Relations dari Hitachi Ltd .

“Kita bisa bertemu dan berdiskusi pada hari Selasa besok, 28 Mei 2019 di ruang kerja Atase Pertanian. Tepatnya pukul 13” jawab Nuryanti seraya undur diri dari pertemuan untuk berangkat menuju METI menghadiri hearing session bersama Kepala Sekretariat Komisi ISPO dan Atase Perdagangan.

Tokyo, 27 Mei 2019.



Hearing Session



Kepala Sekretariat Komisi ISPO, Azis Hidayat, hadir sebagai DELRI pada Hearing Session and Explanation terkait Sertifikasi ISPO bersama Agency for Natural Resources and Energy (ANRE), di METI, Jepang dengan didampingi Atase Pertanian dan Atase Perdagangan untuk mengkonfirmasi aspek keberlanjutan dari sisi lingkungan, sosial dan ketenagakerjaan, konflik pangan dan bahan bakar, serta hukum dan peraturan dari ISPO. Hearing session tersebut bertujuan untuk memperoleh keberterimaan Pemerintah Jepang berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari dewan panelis terhadap kelapa sawit dan produk turunannya dengan sertifikasi yang diwajibkan di Indonesia, ISPO.

Takuya Yamazaki, Director ANRE, METI membuka hearing session dan selanjutnya dipimpin oleh ketua dewan panelis Yukari Takamura, Profesor pada Institute for Future Initiatives, The University of Tokyo. Dewan panelis yang terdiri dari lima orang bersifat independent dengan latar belakang profesi sebagai peneliti senior, akademisi, dan konsultan yang diseleksi dari luar Kementerian/Lembaga Pemerintah di Jepang. Anggota dewan panelis, yaitu Takanobu Aikawa, Senior Researcher pada Renewable Energy Institute; Kenji Imou, Profesor pada Department of Biological and Environmental Engineering, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo; Yasuko Kono, Director for Japan Consumers' Association, Consultant for Consumer; dan Etsuyo Michida, Senior Research Fellow pada Environment and Natural Resource Studies Group, Institute of Developing Economics.

Hearing session berlangsung dari pukul 18.00 – 20.30 yang dialokasikan untuk tiga pemrasaran dengan masing-masing waktu yang diberikan selama 20 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab selama 30 menit. Setelah pemapar pertama, Biomass Power Association (BPA), ISPO memperoleh giliran kedua untuk memaparkan aspek-aspek yang harus dikonfirmasi. Selanjutnya, giliran ketiga ditempati oleh Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO).

Dengan dukungan data dan dokumen legislasi yang telah dipersiapkan, Kepala Sekretariat Komisi ISPO berhasil mengkonfirmasi aspek keberlanjutan dari sisi lingkungan, sosial dan ketenagakerjaan, konflik pangan dan bahan bakar, serta hukum dan peraturan dari ISPO secara komprehensif. Empat pertanyaan dari anggota dewan panelis pun dapat dijawab dengan baik dan meyakinkan.

“Apakah hasil-hasil kelapa sawit dapat diekspor, misalnya dalam bentuk Palm Oil Mill Effluent (POME) dan berapa kuantitas ekspornya?” tanya Aikawa.

“Pada prinsipnya semua hasil dari kelapa sawit dapat diekspor, termasuk POME. Namun untuk kuantitas ekspor tergantung pada permintaan impor atau kebutuhan pasar ekspor yang dituju” jawab Azis melalui juru alih bahasa yang ditunjuk, Bambang Rudyanto, Profesor IT Business pada Wako University.

“Mengapa pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia harus menerapkan sertifikasi ISPO, meskipun telah ada sertifikasi RSPO” tanya Imou.

“Sistem sertifikasi ISPO merupakan komitmen Pemerintah RI sebagai negara pertama di dunia yang mempunyai sistem sertifikasi untuk perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui kebijakan peraturan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 19 tahun 2011 yang kemudian direvisi menjadi Permentan Nomor 11 tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) sebagai implementasi dari Undang-undang Perkebunan yang bersifat mandatory bagi perusahaan kelapa sawit dan voluntary bagi pekebun kelapa sawit. Sistem ISPO telah mengikuti standar internasional, sesuai prinsip sustainability, yaitu memenuhi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan serta taat dan patuh pada peraturan perundangan di Indonesia” tegas Azis.



“Apakah perusahaan yang belum lulus sertifikasi ISPO dapat melakukan aplikasi lagi?” tanya Kono.

“Bagi perusahaan yang masih berstatus tunda diberi kesempatan untuk memenuhi prinsip dan kriteria yang belum comply, terutama yang masih menunggu proses perbaikan” jawab Azis.

“Bagaimana sistem sertifikasi ISPO dalam hal keterbukaan informasi publik” tanya Michida.

“ISPO telah mempunyai laman/website tersendiri yang dapat diakses oleh semua pihak setiap saat terkait berbagai informasi tentang ISPO di alamat www.ispo-org.or.id” jawab Azis.

Acara hearing session tersebut diliput secara langsung dan rekamannya telah diunggah oleh pihak METI melalui laman YouTube dengan alamat link sebagai berikut: <http://www.youtube.com/watch?v=55X7GHuTBXw>.

Tokyo, 27 Mei 2019.

Hitachi Ltd

Atase Pertanian dan Kepala Sekretariat Komisi ISPO, Azis Hidayat menindaklanjuti courtesy call kepada Duta Besar untuk melakukan pertemuan dengan Hitachi Ltd, sebuah perusahaan energi terkemuka di Jepang yang menemukan terobosan teknologi dekomposisi biomassa berkayu yang disebut BESTERS, kependekan dari Biomass Energy Solution Technology for Environmental Recycling Society.

“Berawal dari keputusan kami atas merebaknya hutan bambu yang demikian cepat dibarengi tertanamnya akar bambu di banyak tempat, timbul kekhawatiran atas kelestarian keanekaragaman vegetasi dan tanaman lain akibat ekspansi hutan bambu yang demikian cepat. Padahal bambu dan akar bambu ini karakteristik sama dengan gulma, tumbuh cepat namun karena mengandung kalium dan klorida yang berbahaya, maka biomasnya sulit digunakan” urai Yasuo Tanabe menjelaskan latar belakang penemuan teknologi BESTERS.



“Dengan teknologi BESTERS temuan kami, biomassa berkayu seperti bambu, akar bambu, dan gulma di Jepang telah dapat didekomposisi, sehingga terjadi daur ulang karbon. Seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan energi terbarukan sebagai alternatif tenaga nuklir pun dikembangkan di Jepang. Sehubungan dengan pemanasan global, maka kami pun terdorong untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah, sehingga tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca. Kelebihan teknologi yang menggunakan biomassa bambu ini bahan bakunya tahan atas tekanan cuaca seperti sinar matahari dan kekuatan angin. Namun, ada kekurangannya, umur tanam relatif panjang, perlu waktu 10 tahun untuk tumbuh sebelum dan siap ditebang. Saat kami mendengar bahwa banyak tankos kelapa sawit dan bagase dari pengolahan tebu di Indonesia, kami langsung tertarik” imbuh Yumi Nasu, Assistant Manager e-Value Trading Business Creation Department.

“Prinsip teknologi ini mengubah karbohidrat dalam biomassa dan mengekstrak mineral di dalamnya, sehingga terdekomposisi dan dapat dikembalikan ke dalam tanah sebagai pupuk dan terjadi proses daur ulang karbon serta penurunan emisi gas rumah kaca. Teknologi BESTERS ini dapat menurunkan kadar kalium dan mengendalikan kelunakan bahan serta titik leleh abu. Selain itu juga dapat menurunkan kadar klorida, sehingga dapat mencegah pengarat dan timbulnya dioksin penyebab kanker. Mohon bantuannya untuk disampaikan kepada pabrik gula (PG) dan pabrik kelapa sawit (PKS) bahwa kami ingin melakukan pengujian teknologi BESTERS untuk mendekomposisi bagase atau tankos untuk menyediakan bahan bakar pada boiler atau jika ada power plant” jelas Mutsumi Horitsugi, General Manager for Thermal Power Business Department.

“Indonesia mempunyai 135 PG, 39 masih aktif dan sisanya 96 tidak aktif. Untuk PKS, tercatat sebanyak 1.824 buah, 1.514 berstatus aktif, 260 non response, 5 tutup sementara, dan 45 lagi tutup permanen. PG dan PKS ini di bawah Kementerian BUMN. Oleh karena itu, kami akan sampaikan maksud dan tujuan dari Hitachi untuk menguji teknologi BESTERS di Indonesia kepada Menteri BUMN” jawab Nuryanti.

“Teknologi ini sangat bermanfaat bagi kami di Indonesia karena selama ini bagase dan tankos menjadi limbah yang memakan tempat dan belum tertangani dengan baik. Kami akan sampaikan juga kepada Dirjen Perkebunan inisiatif Hitachi untuk menggunakannya teknologinya di Indonesia. Semoga banyak PG dan PKS yang berminat” tambah Azis.

“Terima kasih banyak atas informasi awalnya. Kami tunggu informasi tentang nama PG dan PKS yang berminat menjadi mitra kami melakukan pengujian teknologi BESTERS di Indonesia” pungkas Tanabe mengakhiri pertemuan.

Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo, Direktur Pengendalian Usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia, Agung P Murdanoto, dan Komisaris Utama PTPN VIII, Karen Tambayong telah menyatakan kesediaannya menjadi mitra Hitachi untuk melakukan pilot project pengujian penggunaan teknologi BESTERS di perusahaannya.

Tokyo, 28 Mei 2019.

Pemkot Yokote

Atase Pertanian menerima kedatangan delegasi Yokote City untuk menindaklanjuti rencana kerjasama dengan Indonesia dalam program magang petani muda. Kepala Departemen Pertanian dan Kehutanan, Kakizaki Hiroyuki bersama dua staf, Yoichi Sato dan Ryo Suzuki, hadir didampingi President Nusantara Research Institute, Komaki Toshihisa beserta Mayuko Saito, Coordinating Manager.

“Setelah berkonsultasi dengan Ibaraki Chuo Engei, kami Pemerintah Kota Yokote sudah siap untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Karena Yokote belum mempunyai pengalaman kerjasama dengan pihak asing atau mendatangkan warga negara lain untuk tinggal dalam waktu lama di Yokote, maka kami perlu waktu untuk mempelajari prosedur dan administrasi keimigrasian yang diperlukan. Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya membantu Kota Yokote memfasilitasi kerjasama magang petani muda dari Indonesia” jelas Kakizaki.

“Kami mengapresiasi keinginan dan kehati-hatian Pemerintah Kota (Pemkot) Yokote dalam memulai kerjasama ini. Mengingat hubungan lintas negara tidak sesederhana kalau masih di dalam internal satu negara. Kami ucapkan terima kasih atas kesiapan Pemkot Yokote menerima petani muda Indonesia untuk magang di Yokote” jawab Nuryanti.

“Walikota berpesan untuk ditanyakan komoditas apa yang ingin didatangi para magang petani muda asal Indonesia karena di Yokote yang siap menerima magang adalah usahatani sayuran. Saat ini di lokasi tersebut terdapat pekerja yang dikontrak untuk masa kerja dua tahun. Semua berasal dari Jepang, tidak ada tenaga kerja asing. Suasana kerjanya seperti dalam tayangan video ini. Pekerja tinggal terpisah dari petani pemilik lahan” imbuh Kakizaki sambil menunjukkan video rekaman usahatani sayuran di Kota Yokote yang mempekerjakan tenaga kerja dari luar Kota Yokote.

“Jika saya perhatikan, jenis usahatani sayuran ini hampir sama dengan yang terdapat di Prefektur Gunma dan Ibaraki. Cara tinggal terpisah dengan petani pemilik pun sama. Yang membedakan adalah pekerja warga negara Jepang, bukan pemegang dari negara asing” terang Nuryanti mengomentari video usahatani sayuran di Kota Yokote sebagai bakal lokasi magang.

“Karena itulah kami merasa siap untuk mulai menerima pemegang. Untuk tahap awal kami akan mendatangkan tiga orang mulai April 2020 untuk magang selama musim tanam saja, hingga akhir bulan September 2020. Apakah hal itu dimungkinkan? Lalu, paling lambat kapan kami harus memulai kesepakatan kerjasama tersebut?” tanya Kakizaki.

“Tentu saja dimungkinkan. Namun pada dasarnya harus ada kesepakatan kerjasama terlebih dahulu dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Pemkot Yokote dengan Kementerian Pertanian. Silakan diajukan proposal kerjasamanya seperti apa. Nanti akan kami sampaikan ke Pusat untuk memperoleh arahan dan tanggapan lebih lanjut. Teringatnya, saat bertemu Walikota 16 Februari yang lalu, beliau menyampaikan akan mengundang Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengunjungi Yokote pada Oktober 2019 ini. Apakah ada pesan khusus dari Walikota tentang hal itu?” tanya Nuryanti.

“Tidak ada pesan khusus dari Walikota tentang hal itu. Nanti akan kami sampaikan pertanyaan tersebut kepada Walikota saat kami kembali. Arahan walikota, kami diminta melakukan kunjungan ke Indonesia untuk bertemu dan mengenal secara langsung penyelenggara magang petani muda di Kementerian Pertanian dan juga untuk mewawancarai tiga orang calon pemegang pada akhir bulan Juli 2019. Jika nantinya Walikota memberi arahan kami untuk sekaligus mengunjungi Kabupaten Pasuruan, maka kami akan memberi kabar secepatnya. Paling lambat pertengahan bulan Juni 2019 ini kami akan menyampaikan proposal kerjasama penyelenggaraan magang petani muda beserta informasi agenda kunjungan ke Indonesia” jawab Kakizaki di akhir pertemuan.

Tokyo, 29 Mei 2019.



Awina Sinergi

Atase Pertanian menerima Ananda Setiyo Ivannanto, President Director dari PT Awina Sinergi Indonesia (A-Wing Indonesia) dan PT Awina Sinergi International (A-Wing International) dengan didampingi Nakamura Hidohide (President Commissioner), dan Taguchi Shigeki, Chairman Japan Taguchi Construction Co Ltd. PT A-Wing merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Jepang yang bergerak di bidang business matching antara Indonesia dan Jepang dengan salah satu mitra strategis adalah Dentsu, sebuah perusahaan pemasaran terbesar di dunia yang mempunyai koneksi lebih dari 100 ribu perusahaan di Jepang.

“Pengalaman kami selama sepuluh tahun bersama Dentsu melakukan business matching antara Indonesia dan Jepang telah berhasil membawa Lets Agriculture Program (LEAP), perusahaan dari Jepang yang hendak berekspansi ke Indonesia dengan membawa model pertanian modern yang didukung Internet of Things (IOT) yang mampu melakukan analisa 100 parameter” papar Nakamura menjelaskan ruang lingkup usahanya.

“Dengan IOT, teknologi kami dapat menghitung jumlah produksi dan pendapatan kepada petani. Selain itu, teknologi kami bisa meningkatkan produktivitas hingga tiga kali lipat dibanding usahatani konvensional. Pada tahap awal kami akan melakukan pilot project di Bogor bekerja sama dengan Institute Pertanian Bogor (IPB). Seratus parameter yang kami gunakan nanti akan menjadi data dasar pengembangan bisnis LEAP di Indonesia. Alasan kami memilih Indonesia sebagai lokasi pertama pilot project adalah kondisi cuaca Indonesia yang relatif stabil, tidak ada perbedaan suhu yang mencolok antar musim dan antara siang dan malam. Selain faktor cuaca, topografi lahan di Indonesia relatif datar, tidak ada yang terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Jika pilot project kami berhasil di Indonesia, negara tujuan kami berikutnya adalah Bangladesh yang topografi lahannya mirip dengan Indonesia” imbuh Nakamura.

“Apakah teknologi ini bisa digunakan untuk seluruh produk pertanian, atau hanya komoditas tertentu?” tanya Nuryanti.

“Teknologi ini hanya dapat digunakan untuk tanaman sayuran yang hasilnya berasal dari bunga/buah dan daun, bukan dari jenis umbi-umbian atau pohon” jawab Ivannanto.

“Setelah pilot project, apakah A-Wing bersedia bermitra dengan petani tanaman sayur di Indonesia? Lalu jika hendak menjadi mitra, apakah ada syarat tertentu yang harus dipersiapkan?” tanya Nuryanti lebih lanjut.

“Investasi kami untuk pilot project ini senilai Rp60 milyar rupiah. Jika ada petani yang berminat, petani cukup menyediakan lahan dan tenaga kerja saja. Dengan teknologi kami ini, akan diperoleh data produksi harian untuk dasar bahan perhitungan pendapatan dari hasil penjualan. Investasi kami akan dibayar dari sebagian keuntungan hasil penjualan tersebut. Selain memberi jaminan produksi dan pendapatan seperti itu, kami akan mengajarkan know how penggunaan teknologi ini agar dapat digunakan secara lebih luas di Indonesia. Rencananya setelah pilot project dengan IPB, kami akan melakukan pertemuan dengan seluruh kabupaten di Indonesia untuk memperluas penggunaan teknologi ini. Dengan demikian, pilot project kami akan menjadi branding Japan-Indonesia LEAP” tegas Nakamura antusias.

“Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Ini sangat menarik. Kami memang memerlukan investasi dan teknologi modern seperti yang dikembangkan A-Wing untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas, sehingga dapat memenuhi standar untuk pasar ekspor secara global. Kami berharap akan banyak pilot project A-Wing di Indonesia” pungkas Nuryanti.

Tokyo, 31 Mei 2019.

